

**FUNGSI DAN PERAN PENDIDIKAN POLITIK DALAM KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT**

Dosen Pengampu:
Dr. Nasiwan, M.Si



Disusun oleh :
Rudy Hartono
15416241058
P.IPS B 2015

**Program Studi Pendidikan IPS
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta
2016**

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-NYA kepada penyusun untuk dapat menyelesaikan tugas Peran Dan Fungsi Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Bermasyarakat. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Keorganisasian.

Dalam penyusunan makalah ini saya berterima kasih kepada pihak-pihak yang terkait yang telah memberikan informasi yang berguna bagi saya untuk memperlancar dalam pembuatan makalah ini.

Saya berharap dengan disusunnya makalah ini dapat memberikan pengetahuan bagi para pembacanya. Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik serta saran dari semua pihak yang membangun saya harapkan untuk mengharapkan kesempurnaan tugas akhir ini.

Yogyakarta, 8 Juni 2016

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	4
A. Latar Belakang	4
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
BAB II PEMBAHASAN	6
A. Definisi Pendidikan	6
B. Fungsi Pendidikan	6
C. Pengertian Pendidikan Politik	8
D. Fungsi Pendidikan Politik (Political Forming, Politische Bildung) Inti Dan Tujuannya	10
E. Peran Pendidikan Politik dalam Masyarakat.....	18
F. Fungsi Belajar Politik Dan Pertanggungjawaban Politik bagi Masyarakat.....	28
BAB III PENUTUP.....	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik secara ringkas adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan kekuasaan, pemerintahan, proses memerintah dan bentuk organisasi pemerintahan, lembaga/institusi, tujuan negara atau pemerintahannya. Ilmu politik membahas secara sistematis dan analitis masalah kenegaraan, dan merupakan ilmu sosial yang paling tua di dunia. Ilmu politik adalah disiplin ilmu yang beroperasi dengan konsep dan ide filosofis tersendiri, yang dipraktekkan dengan metode pertanyaan dan analisis tentang pengorganisasian suatu negara, dengan tujuan agar rakyat bisa hidup makmur dan bahagia.

Dalam negara demokrasi, tercakup hak-hak seperti hak kemerdekaan pers, hak menyatakan pendapat, hak beragama, hak berorganisasi. Di negara demokrasi ada kebebasan yang sama bagi setiap warganegara, serta adanya pengakuan terhadap nilai-nilai dan martabat individu selaku pribadi. Oleh karena itu pendidikan harus diupayakan untuk, mendidik manusia dan anak manusia supaya bisa berkembang dan bebas maksimal.

Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dan memahami apa hak dan kewajiban mereka sebagai warganegara. Mereka hanya hidup berdsarkan kepentingan mereka masing-masing dan tanpa peduli dengan hak dan kewajiban mereka. Padahal jika mereka menggunakan hak dan kewajiban mereka sebagai warganegara dalam partisipasi politik, mereka dapat turut serta merubah pola pemeritahan yang ada pada negara yang dapat mempengaruhi hidup mereka.

Hal tersebut terjadi akibat kurangnya pendidikan politik terhadap rakyat. Dan masyarakat sendiri kurang begitu paham mengenai pendidikan politik yang seperti ini. Lewat pendidikan masyarakat seharusnya dapat memecahkan permasalahan

hidupnya, untuk kemudian mengantisipasi terjadinya perubahan dan kemajuan di hari-hari mendatang.

Ketidaktahuan masyarakat akan berpolitik mencerminkan bahwa pendidikan politik tidak berperan secara maksimal dalam sebuah negara tersebut. Oleh karena itu, negara sangat berkepentingan dengan pendidikan warga negaranya, sehingga pendidikan harus diutamakan dan direncanakan dengan sebaik-baiknya.

Pendidikan politik harusnya membina dan mengembangkan pengetahuan masyarakat dalam kehidupan politik guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena masyarakat merupakan sumber daya insani potensial yang perlu dikembangkan dan diakutualkan, juga perlu mendapatkan pendidikan politik yang wajar, supaya mampu berpartisipasi politik.

Masyarakat hanya perlu dibimbing dan diarahkan supaya mereka mempunyai keinginan untuk turut serta dalam aktivitas politik.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang di maksud dengan pendidikan politik?
2. Apa fungsi dari pendidikan politik bagi masyarakat?
3. Apa peran pendidikan politi bagi masyarakat?
4. Apa fungsi belajar pendidikan politik bagi masyarakat.?

C. Tujuan

1. Mengetahui apa yang di maksud dengan pendidikan politik.
2. Mengetahui fungsi pendidikan politik bagi masyarakat.
3. Mengetahui peran pendidikan politik bagi masyarakat.
4. Mengetahui fungsi belajar pendidikan bagi masyarakat.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Pendidikan

Pendidikan berasal dari kata didik, mendidik berarti memelihara dan membentuk latihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991) pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Poebakawatja dan Harahap dalam Muhibbin Syah (2001) menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk meningkatkan kedewasaan yang selalu diartikan sebagai kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya.

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. (Sugiarto,dkk. 2013: 3)

B. Fungsi Pendidikan

Fungsi pendidikan merupakan serangkaian tugas atau misi yang diemban dan harus dilaksanakan oleh pendidikan (Dirto hardisusanto, dkk, 1995: 57). Tugas atau misi pendidikan itu dapat tertuju pada diri manusia yang dididik maupun kepada masyarakat bangsa di tempat ia hidup. Bagi dirinya sendiri, pendidikan berfungsi menyiapkan dirinya agar menjadi manusia secara utuh, sehingga ia dapat menunaikan tugas hidupnya secara baik dan dapat hidup wajar sebagai manusia. Fungsi pendidikan terhadap masyarakat setidaknya-tidaknya ada dua bagian besar, yaitu fungsi *preserveratif* dan fungsi *direktif*. Fungsi *preserveratif* dilakukan dengan melestarikan tata sosial dan tata nilai yang ada dalam masyarakat, sedangkan fungsi *direktif* dilakukan oleh pendidikan sebagai agen pembaharuan

sosial, sehingga dapat mengantisipasi masa depan. Selain itu pendidikan mempunyai fungsi (1) menyiapkan sebagai manusia, (2) menyiapkan tenaga kerja dan (3) menyiapkan warga negara yang baik. (Dwi Siswoyo, dkk. 2013: 20-21)

Pendidikan untuk menyiapkan manusia sebagai manusia. Pernyataan ini dapat dimengerti jika kita kembali mengingat pendapat Driyarkara (1980: 78) bahwa pendidikan adalah usaha memanusiasikan manusia muda. Manusia muda yang belum sempurna, yang masih tumbuh dan berkembang, dipersiapkan ditumbuh kembangkan menjadi manusia, yaitu manusia seutuhnya. Manusia yang utuh mengandung arti utuh dalam potensi dan utuh dalam wawasan. Utuh dalam potensi maksudnya bahwa manusia sebagai subyek yang berkembang, memiliki potensi jasmani dan rohani. Potensi manusia meliputi (1) badan dalam pancaindera, (2) potensi berfikir, (3) potensi rasa, (4) potensi cipta meliputi daya cipta, kreativitas, fantasi, khayal, dan imajinasi, (5) potensi karya, (6) potensi budi nurani yaitu kesadaran budi, hati nurani, dan kata hati. Utuh dalam wawasan dalam arti sebagai manusia yang sadar nilai, yaitu (1) wawasan dunia akherat, (2) wawasan jasmani rohani, (3) wawasan individu dan sosial, (4) wawasan akan waktu, yaitu masa lalu, sekarang dan yang akan datang. (Dwi Siswoyo, dkk. 2013: 21)

Pendidikan untuk menyiapkan manusia sebagai tenaga kerja. Pernyataan ini dapat dimengerti karena dalam hidupnya manusia pasti harus melakukan suatu karya demi hidupnya. Untuk dapat berkarya atau tegasnya tenaga kerja yang bekerja untuk mencari nafkah, maka ia harus disiapkan. Penyiapan manusia menjadi tenaga kerja ini dilakukan melalui pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah. (Dwi Siswoyo, dkk. 2013: 21)

Pendidikan menyiapkan manusia sebagai warga negara yang baik. Maksud dari pernyataan ini adalah agar manusia sebagai warga negara suatu negara yang baik, yang dapat melaksanakan semua kewajiban dan menyadari akan haknya secara baik. Melalui pendidikan dimaksudkan agar para warga negara ini menjadi patriotisme nasional. (Dwi Siswoyo, dkk. 2013: 21)

C. Pengertian Pendidikan Politik

Alfian dalam jurnal Nasiwan menyatakan bahwa pendidikan politik dimaknai sebagai usaha yang terencana, dengan sadar untuk memberikan penyadaran kepada warga negara yang sudah berhak memilih. Tujuan dari pendidikan politik yang terpenting adalah membentuk kesadaran warganegara tentang hak dan kewajibannya sesuai dengan konstitusi. Pendidikan politik merupakan faktor penting bagi terbentuknya sikap politik warganegara yang mendukung berfungsinya sistem pemerintahan secara sehat. Pendidikan politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak di bangun (Alfian dalam jurnal Sunarso).

Manfaat pendidikan politik dapat melatih warganegara agar meningkatkan partisipasi politiknya. Huntington dalam jurnal Nasiwan mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Definisi ini mensyaratkan bahwa yang tercakup dalam partisipasi politik adalah kegiatan, dengan demikian orientasi-orientasi para warga negara terhadap politik, pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai politik kompetisi dan keefektifan politik, persepsi-persepsi tentang relevansi politik, itu seringkali juga tidak berkaitan.

Lewat pendidikan politik individu diajarkan bagaimana mereka mengumpulkan informasi dari berbagai media massa, diperkenalkan mengenai struktur politik, lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga pemerintahan (Almond dan Verba dalam jurnal Sunarso).

Beberapa definisi mengenai pendidikan politik adalah sebagai berikut:

1. pendidikan politik adalah bentuk pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik, agar menang dalam perjuangan politik

2. pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik.
3. R. Hayer menyebut pendidikan politik ialah usaha membentuk manusia partisipan yang bertanggung jawab dalam politik. (Kartini Kartono, 2009: 64)

Jadi pendidikan politik itu adalah suatu proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan secara sengaja, terencana, bisa bersifat formal maupun informal, dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi, agar warganegara mau berpartisipasi dalam politik, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab.

Dalam filosofi pendidikan, belajar merupakan sebuah proses panjang seumur hidup. Artinya pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Hal ini diperlukan mengingat semakin kompleksnya masalah-masalah politik. Dalam proses pendidikan politik melibatkan semua golongan, baik golongan muda hingga golongan tua. Proses pendidikan politik harus dimulai sejak dini, dimana keluarga menjadi tokoh yang berperan sebagai pelaku utamanya. Karena keluarga adalah lingkungan pertama tempat bagi sang anak bersosialisasi. Keluarga menjadi sarana yang paling strategis terutama untuk pembentukan kepribadian dasar dan sikap-sikap sosial bagi sang anak nantinya yang akan berpengaruh dalam orientasi politik. Keluarga adalah individu paling dekat sehingga paling efektif untuk menanamkan sikap dan nilai-nilai. Kemudian sekolah adalah sarana selanjutnya untuk melanjutkan tugas keluarga dalam pendidikan berpolitik melalui proses pembelajaran seperti adanya mata pelajaran PKN di ruang lingkup Sekolah Dasar. Proses pendidikan berlanjut ketika sang anak beranjak dewasa dan mempunyai lingkungan bermain baru bagi dirinya. Lingkungan bermain mulai mengambil peran dalam pendidikan politik setelah lepas

dari keluarga. Selain itu, media masa juga salah satu yang berperan penting dalam penyaluran pendidikan politik. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik merupakan tugas seluruh warga Negara dan untuk seluruh warga negara pula.

D. Fungsi Pendidikan Politik (Political Forming, Politische Bildung) Inti Dan Tujuannya

Betapa pentingnya pendidikan politik bagi semua warganegara Indonesia, maka menjadi harapan kita semua agar pendidikan politik yang diterapkan di Indonesia ini khas bersumber pada aspirasi yang digali dari kepribadian dan kekayaan spiritual bangsa sendiri dan telah disepakati secara nasional, demi tegaknya Republik Indonesia, dan demi tercapainya tujuan-tujuan politik negara, yang pada hakekatnya merupakan pencerminan murni dari harapan dan aspirasi bangsa/rakyat Indonesia.

Pendidikan politik disebut pula sebagai *political forming* atau *Bildung*. Disebut “forming” karena terkandung intensi untuk *membentuk insan politik* yang menyadari status/kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Dan disebut “Bildung” (pembentukan atau pendidikan diri sendiri), karena istilah tersebut menyangkut aktivitas : membentuk diri sendiri, dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi *insan politik*. (Kartini Kartono, 2009: 63)

Pendidikan politik pada hakekatnya merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa. Pendidikan macam ini tidak menonjolkan proses kultivasi individu menjadi “intelektual politik” yang bersinggasa dalam menara gading keilmuan, atau menjadi pribadi kritis dan cerdas “yang terisolasi” dari masyarakat lingkungannya. Akan tetapi lebih menekankan relasi individu dengan individu lain, atau individu dengan masyarakatnya di tengah medan sosial; dalam satu konteks politik, dengan kaitannya pada aspek-aspek sosial-ekonomi-budaya; di tengah situasi-situasi konflik yang ditimbulkan oleh bermacam-macam perbedaan, atau oleh adanya pluriformitas (kemajemukan budaya). (Kartini Kartono, 2009: 63)

Politik dapat diartikan sebagai aktivitas, perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang

sah berlaku tengah masyarakat. Aturan dan keputusan tadi ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah, ditengah medan sosial yang dipenuhi kemajemukan/kebinekaan, perbedaan kontroversi, ketegangan dan konflik. Oleh adanya kekuatan-kekuatan sosial yang bermacam-macam itu perlu ditegakkan tata tertib.

Keikutsertaan kita dalam aktivitas politik artinya kita ikut menentukan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang berlaku di masyarakat. Misalnya kita memilih seseorang pemimpin, tentunya pemimpin tersebut apabila terpilih dalam pemilihan umum dan berkuasa, dia mempunyai hak untuk menentukan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang ada dalam masyarakat dan mau tidak mau masyarakat harus mengikutinya. Pemimpin tadilah yang menentukan bentuk pemerintahan yang ada. Terpilihnya pemimpin tersebut tentunya sebab dari keterlibatan kita dalam berpolitik (misal pemilu), dan kita harus bertanggung jawab dengan apa yang telah kita pilih walaupun peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat tadi tidak menguntungkan bagi kita atau bahkan merugikan kita. Karena itu adalah konsekuensi yang harus kita terima saat kita terlibat dalam aktivitas politik.

Dalam jurnal Nasrullah mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu dewasa ini sangat membutuhkan Pendidikan politik, bukan hanya sekedar memberikan pemahaman tentang teknik dan tata cara pencoblosan dan hal-hal yang bersifat teknis lainnya, namun bertujuan untuk menyentuh nilai/norma yang lebih mengarah pada arti dan peran penting pada pemilu.

Istilah pendidikan politik dalam Bahasa Inggris hampir sama dengan political socialization jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia, Istilah political socialization bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah political socialization banyak yang menyamakan istilah pendidikan politik dengan istilah Sosialisasi Politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Menurut Ramlan Surbakti, dalam memberikan pengertian

tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik.

Menurut Surbakti, Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik di antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

Dari keterangan ahli di atas dapat dijabarkan bahwa pendidikan politik adalah suatu bentuk pendidikan yang dijalankan secara terencana dan disengaja baik dalam bentuk formal maupun informal yang mencoba untuk mengajarkan kepada setiap individu agar sikap dan perbuatannya dapat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku secara sosial.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita ketahui bahwa pendidikan dan politik adalah dua unsur yang saling mempengaruhi. Pengembangan sistem pendidikan harus selalu berada dalam kerangka sistem politik yang sedang - dijalankan oleh pemerintahan masa itu. Oleh karena itu segala permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan akan berubah menjadi permasalahan politik pada saat pemerintah dilibatkan untuk memecahkannya.

Tujuan utama yang dimiliki oleh pendidikan politik. Pertama, dengan adanya pendidikan politik diharapkan setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan. Kedua, bahwa dengan adanya pendidikan politik setiap individu tidak hanya sekedar tahu saja tapi juga lebih jauh dapat menjadi seorang warga negara yang memiliki kesadaran politik untuk mampu mengemban tanggung jawab yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kadar partisipasi dalam dunia politik.

Menurut Nasiwan pendidikan politik diperlukan bukan saja bagi para pemilih yang kurang (belum) memiliki pemahaman tentang persoalan politik tetapi juga bagi para pemilih yang sudah memiliki pengetahuan tentang persoalan politik. Hal

demikian dikarenakan sikap apatis pada aktivitas politik dimungkinkan dapat muncul dari kalangan masyarakat yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan luas pada persoalan politik. Hal ini juga dikarenakan frustrasi, kecewa dengan realitas politik yang jauh dari idealitas.

Dengan kata lain pendidikan politik memiliki makna yang penting dan strategis dalam rangka mendorong agar warga negara (para pemilih) untuk memiliki pengetahuan politik yang memadai, sekaligus kesadaran akan suatu pentingnya sistem politik yang ideal.

Jadi Fungsi dari pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam berpolitik. Sebab partisipasi aktif itu mempunyai pengaruh dan kekuatan, rakyat bisa ikut dalam pengawasan terhadap perbuatan mengatur masyarakat dan negara. Maka menjalani proses politik lewat pendidikan politik dan belajar berpolitik.

Demokrasi bukan merupakan situasi yang sudah selesai begitu saja, tetapi merupakan proses yang terus menerus berlanjut dan digarap tanpa henti-hentinya menuju ke arah kemajuan dan kebaikan. Oleh karena itu diperlukan pula demokratisasi pribadi manusianya dan demokratisasi lembaga-lembaga birokrasi dan aparat pemerintah agar tidak melaksanakan kebijakannya otoriter dan sewenang-wenang. Dengan demikian, demokrasi juga mengandung usaha memperbesar kekuasaan opini publik dan partisipasi politik rakyat. Serta ikut melakukan pengawasan atau kontrol terhadap jalannya pemerintahan menuju ke pencapaian pemerintahan yang bersih.

Unsur pendidikan dalam pendidikan politik itu pada hakekatnya merupakan aktivitas pendidikan diri (mendidik dengan sengaja diri sendiri) yang terus menerus berproses di dalam person, sehingga orang yang bersangkutan lebih mampu memahami dirinya sendiri dan situasi-kondisi lingkungan sekitarnya. Kemudian mampu menilai segala sesuatu secara kritis, untuk selanjutnya menentukan sikap dan cara-cara penanganan permasalahan-permasalahan yang ada di tengah lingkungan hidupnya. Dengan begitu pendidikan politik merupakan proses belajar bukan hanya

untuk menambah informasi dan pengetahuan saja, akan tetapi lebih menekankan kemampuan mawas situasinya secara kritis, menentukan sikap yang benar, dan melatih ketangkasan aksi/ berbuat. (Kartini Kartono, 2009: 63-64)

Inti dari pendidikan politik adalah pemahaman politik atau pemahaman aspek-aspek politik setiap permasalahan. Dan pemahaman politik berarti pemahaman konflik. Hidup bermasyarakat itu adalah hidup di tengah banyak dimensi konflik dan ketegangan. Berkaitan dengan pengertian ini, berbuat politik berarti mempengaruhi dan ikut mengambil keputusan di tengah medan politik dan pertarungan konflik-konflik.

Maka pendidikan politik itu merupakan proses mempengaruhi individu agar dia memperoleh informasi lebih lengkap, wawasan lebih jernih, dan keterampilan politik yang lebih tinggi, sehingga dia bisa bersikap kritis dan lebih intensional/terarah hidupnya. Dengan demikian pendidikan politik mendorong orang untuk melihat diri sendiri dan lingkungannya dengan cara lain, lalu berani berbuat lain, menuju pada eskalasi diri dan peningkatan taraf hidup masyarakat. (Kartini Kartono, 2009: 67)

Partai politik menjadi salah satu yang berperan dalam pendidikan politik di masyarakat. Karena partai selalu mempengaruhi masyarakat dalam sebuah keputusan. Partai akan “mendoktrin” masyarakat supaya berpihak kepada mereka. Hanya saja entah seperti apa pendidikan yang diajarkan oleh partai politik, karena biasanya bentuk pendidikan yang mereka lakukan hanya sebatas “iming-iming” untuk masyarakat. Akan tetapi jika masyarakat tau tujuan pendidikan politik yang sebenarnya, masyarakat tidak akan tergiur oleh iming-iming yang telah diberikan oleh partai tersebut. Mereka akan menyikapinya dengan kritis, memahami situasi dan tentunya mereka berhak meminta/menuntut untuk aksi nyata dari partai politik tersebut.

Tujuan pendidikan politik ialah:

1. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat, rakyat, dan seterusnya) :

- Mampu memahami situasi sosial-politik penuh konflik
 - Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap
 - Aktivasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu/ atau perorangan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara
 - Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
2. Memperhatikan dan mengupayakan :
- Peranan insani setiap individu sebagai waarganegara (melaksanakan realisasi diri/ aktualisasi diri dari dimensi sosialnya)
 - Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik)
 - Agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara. (Kartini Kartono, 2009: 68-69)

Maka dalam konteks uraian di atas, pendidikan politik di Indonesia dapat dinyatakan sebagai :

- Rangkaian upaya edukatif yang sistematis dan intensional untuk memantapkan kesadaran politik dan kessadaran bernegara, dalam menunjang kelestarian pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah hidup serta landasan konstitusional
- Melakukan upaya pembaharuan kehidupan politik bangsa Indonesia, dalam rangka tegaknya satu sistem politik yang demokratis, sehat dan dinamis. (Kartini Kartono, 2009: 69)

Landasan pokok yang dipakai dalam melaksanakan pendidikan politik ialah Pancasila, UUD 1945, GBHN dan Sumpah Pemuda 1928.

Khusus bagi generasi mudanya, tujuan pendidikan politik di Indonesia adalah:

1. Membangun generasi muda Indonesia yang sadar politik, sadar akan hak dan kewajiban politiknya selaku warganegara, di samping sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang harus terus menerus membangun.
2. Membangun orang muda menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yang perwujudannya tercermin dalam seluruh sifat watak/karakteristik kepribadian Indonesia (tidak lupa jatidirinya, dan tidak mengalami proses alienasi). (Kartini Kartono, 2009: 69-70)

Ciri karakteristik kepribadian Indonesia yang berkaitan dengan dimensi politik yang diharapkan bisa dibina lewat pendidikan politik antara lain ialah:

1. Sadar akan hak, kewajiban, tanggung jawab etis/moril dan politik terhadap kepentingan bangsa dan negara, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, dan memberikan keteladanan yang baik.
2. Dengan sadar menaati hukum dan UUD 1945, memiliki disiplin pribadi, disiplin sosial dan nasional, nasionalisme yang teguh dan tidak sempit atau chauvinistic.
3. Berpandangan jauh ke depan (futuristik), dengan tekad perjuangan mencapai taraf kehidupan bangsa yang lebih tinggi, berkeadilan dan berkesejahteraan, didasarkan pada kemampuan obyektif dan kekuatan kolektif bangsa Indonesia sendiri.
4. Aktif berpartisipasi, dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan politik.
5. Secara kesinambungan menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran adanya keanekaragaman/pluriformitas suku-suku bangsa dan agama, serta mendukung sistem kehidupan nasional yang demokratis.

6. Sadar akan perlunya memelihara lingkungan hidup manusia dan lingkungan alam sekitar agar lestari laras danimbang (terjamin ekosistemnya) sebagai wadah kehidupan yang sehat. (Kartini Kartono, 2009: 70-71)

Pendidikan politik itu tidak hanya diarahkan pada perubahan-perubahan sikap-sikap politik individu saja, akan tetapi juga diarahkan pada pembaharuan bentuk-bentuk struktur politik dan lembaga kemasyarakatannya. Pendidikan politik merupakan bimbingan edukatif yang terarah, bertujuan, sistematis, ditujukan pada pencapaian hari esok yang lebih baik, melawan ketidakadilan, pemerintah teknokratis otoriter, tiranik atau despotik. Pendidikan politik itu diarahkan pada humanisasi masyarakat Indonesia, agar lebih melegakan untuk dihuni oleh rakyat dan tidak boleh indoktrinatif sifatnya.

Semua upaya untuk memelekkkan secara politik penduduk Indonesia itu tidak luput dari kesulitan dan hambatan, antara lain berupa :

1. Amat sulitnya menyadarkan rakyat akan kondisi diri sendiri yang diliputi banyak kesengsaraan dan kemiskinan, sebagai akibat terlalu lamanya hidup dalam iklim penindasan, penghisapan dan penjajahan, sehingga mereka menjadi “terbiasa” hidup dalam keserba-kekurangan dan ketertinggalan. Sulit mendorong mereka kearah konsientisasi diri mengungkapkan segala problema yang tengah dialami.
2. Apatisme politik dan sinisme politik yang cenderung menjadi sikap putus asa itu mengakibatkan rakyat sulit mempercayai usaha-usaha edukatif dan gerakan-gerakan politik yang dianggap palsu dan menina-bobokan rakyat belaka. Sulit pula untuk megajak mereka untuk berfikir lain dengan nalar jernih. Bahkan banyak diantara massa rakyat yang takut pada kemerdekaan (dirinya)

3. Dengan latar belakang pendidikan yang rendah atau kurang, rakyat kebanyakan sulit memahami kompleksitas sosial dan politik di sekitar dirinya.
4. Para penguasa yang otoriter cenderung tidak menghendaki adanya pendidikan politik, karena mereka berkepentingan sekali dengan status quo dan pelestarian rezim-nya. Partisipasi aktif dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan oleh rakyat itu tidak dikehendaki, sebab mengurangi kebebasan dan kekuasaan organ-organ ketatanegaraan. (Kartini Kartono, 2009: 72-73)

E. Peran Pendidikan Politik dalam Masyarakat

Pendidikan politik harus bisa berkembang dalam kebebasan di tengah masyarakat sebagai gerakan kontra penuh humanisasi. Pendidikan politik juga harus berisikan ajaran untuk berani mendobrak banyak kepincangan di masyarakat yang menimbulkan kesengsaraan pada rakyat, mengarah tingkat demokrasi sejati dan demokrasi vital. Pendidikan politik juga mengembangkan daya kritis rakyat, di samping menunjukkan kemungkinan-kemungkinan untuk memfungsikan semua lembaga politik dan kemasyarakatan secara lebih pragmatis dan lebih efisien. Lebih singkatnya, Pendidikan politik harus bisa meningkatkan proses demokratisasi dari masyarakat bangsa. Masyarakat harus memaksimalkan hak mereka dalam berapresiasi, menyampaikan saran, dan pendapat serta bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dalam kehidupan berpolitik.

Pendidikan politik dalam bahasa pendidikan dinyatakan sebagai upaya belajar dan latihan mensistematikkan aktivitas sosial, dan membangun kebijakan-kebijakan terhadap sesama manusia di suatu wilayah negara. (Kartini Kartono, 2009: 68) Dimaksud sebagai upaya belajar karena pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Bahkan bisa disebut

orang yang telah belajar politik kemudian berhenti belajar maka orang tersebut sudah tertinggal dari perkembangan politik, karena politik terus berkembang.

Kebijakan yang di maksud berupa : pengembangan sportivitas, bertingkah laku baik, jujur, solider dan toleran terhadap bangsa sendiri. Bersikap kooperatif dan praktis, mampu bekerjasama dalam kelompok, jujur dan lain-lain. Pendidikan politik identik dengan pembentukan hati nurani politik, yang di dalamnya secara implisit mencakup rasa tanggung jawab etnis terhadap sesama warganegara.

Dalam iklim demokrasi, rakyat diberi kesempatan untuk memilih sendiri alternatif yang menguntungkan bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dengan mendapatkan pendidikan politik, massa rakyat diharapkan bisa menjadi kreatif, kritis, mandiri dan partisipatif bila kepadanya diberikan kesempatan untuk berperilaku demokratis. Oleh karena itu dia diajar untuk bersikap jujur dan berani, serta sanggup mempertanggung jawabkan kejadian-kejadian yang terjadi di negaranya, di samping ikut menentukan norma-norma yang sepatutnya jadi panutan umum. Dengan mendapatkajn Pendidikan politik masyarakat diharapkan bisa menjadi kreatif, kritis, mandiri otonom, mantap dan partisipatif bila kepadanya diberikan kesempatan untuk berperilaku demokratis. (Kartini Kartono, 2009: 79)

Pendidikan politik menumbuhkan skeptisisme politik dan kearifan wawasan politik mengenai peristiwa-peristiwa politik dengan segala jaringan-jaringannya. Dengan begitu orang mampu menjalankan fungsi kontrol politik, verifikasi (pembuktian) terhadap realitas politik yang tengah berlangsung. Skeptisisme harus diartikan sebagai skeptisisme ilmiah, menghindari rasa mudah percaya dan sikap naif tidak kritis; yaitu gampang percaya dan meyakini “kebenaran” mitos-mitos politik, doktrin-doktrin politik dan propaganda politik yang semuanya bersifat melenakan aya kognitif (pengenalan). (Kartini Kartono, 2009: 79)

Pendidikan politik mendorong orang untuk melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap jaringan-jaringan politik dan kemasyarakatan menganalisis dan membahas konflik-konflik aktual dengan kemampuan yang dimiliki rakyat

sendiri. Dengan demikian orang menyadari hak dan kewajibannya sebagai warganegara yang baik untuk mengatur masyarakat, negara dan pemerintahan.

Dengan pendidikan politik bukan hanya pemahaman peristiwa-peristiwa politik dan konflik yang diutamakan, akan tetapi orang justru menekankan aktivitas politik secara sadar dan benar sesuai dengan azas-azas demokrasi sejati. Politik itu bukan monopoli para pemimpin, kaum berduit atau kelompok-kelompok istimewa privileged saja. Akan tetapi politik itu merupakan milik bersama bagi setiap warganegara. (Kartini Kartono, 1996: 57)

Politik dan negara bukan hanya masalah teoretis, fiksi yuridis, atau urusan abstrak dan idealistik, akan tetapi betul-betul merupakan kenyataan telanjang dan fakta keras-kejam, penuh unsur kontroversial atau kontradiktif dan konflik-konflik tajam. Maka yang penting bagi kita semua adalah bukan menetapkan formalitas-formalitas resmi dan banyak preskripsi yuridis, akan tetapi apakah proses demokratisasi yang tersirat dalam sila ke empat pancasila kita sudah ditarapkan dengan benar atau belum di tengah kenyataan hirup sehari-hari.

Pendidikan politik banyak membahas konflik-konflik aktual. Dan lewat Pendidikan politik akan diperoleh kemampuan rakyat untuk menganalisa bermacam-macam konflik tadi, serta ikut memecahkan dengan cara rakyat itu sendiri; bukan dengan cara-cara yang ditekankan dari "atas". Dengan demikian orang menyadari hak dan kewajibannya sebagai warganegara yang baik untuk ikut mengatur masyarakat sekitar, negara dan pemerintahan. (Kartini Kartono, 2009: 81)

Menjadi semakin jelas bagi kita, bahwa politik itu bukan monopoli para pemimpin, kaum berduit dan kelompok-kelompok istimewa privileged saja. Akan tetapi politik itu merupakan milik bersama, berupa garapan bersama bagi setiap warganegara untuk dipahami, dimanfaatkan, dan dipakai sebagai alat untuk mewujudkan kaedilan sosial serta kesejahteraan materi-spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia dan bukan kesejahteraan bagi sekelompok kecil kaum elite penguasa serta para konglomerat saja.

1. Tujuan Pendidikan politik dan peranan insani

Tujuan pendidikan dan pengajaran di Indonesia adalah membentuk manusia susila yang cakap, dan warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air berdasarkan asas Pancasila dan UUD 1945.

Analog dengan tujuan pendidikan nasional kita tersebut di atas, maka tujuan pendidikan politik Indonesia adalah

1. Menampilkan peranan insani/humani setiap individu yang unik selaku warganegara, dengan jalan mengembangkan potensi dan bakat kemampuan semaksimal mungkin
2. Agar mampu aktif berpartisipasi dalam proses politik untuk membangun bangsa dan negara. (Kartini Kartono, 2009: 82)

Peranan insani ini memungkinkan terjadinya pengembangan bakat dan kemampuan setiap individu dan melaksanakan fungsi politiknya sesuai dengan status dan misi hidup masing-masing. Semua aktivitasnya dilembagakan atas dasar kebebasan dan kemauan sendiri, dalam relasi konfrontatif maupun kerjasama ; yaitu dengan memusyawarahkan secara bersama, dalam kegiatan memformulasikan jawaban-jawaban dari masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Pendeknya, dengan cara berdialog dalam kelompok-kelompok politik secara terbuka; diarahkan ke upaya membangkitkan danmeningkatkan partisipasi politik yang kreatif, guna membangun kesejahteraan umum serta budaya nasional, di tengah relasi-relasi kemasyarakatan, disertai rasa tanggung jawab penuh. (Kartini Kartono, 2009: 82-83)

Belajar politik dalam pendidikan politik itu secara implisit mengandung perbuatan/aksi politik; yaitu berupa partisipasi politik, menanggulangi secara konkrit atau melaksanakan secara nyata/operasional dalam proses politik.

Tujuannya ialah membawakan perubahan dan perbaikan dalam struktur-struktur politik, dan keberesan semua urusan. Sehubungan dengan hal ini, situasi belajar politik itu memerlukan dimensi *distansi* dalam ruang dan waktu, agar orang bisa berfikir obyektif dan jernih. Maka distansi psikologis itu merupakan salah satu persyaratan dalam proses belajar (politik), agar orang bisa

- Mawas diri dan melakukan koerksi terhadap kekeliruan-kekeliruan di masa lampau, dan tidak akan mengulang kesalahan yang sama
- Secara serius meragukan diri sendiri serta perbuatan-perbuatan yang lalu, dan mau memulai dari awal lagi
- Bersikap terbuka dan transparan yang menjadi tuntutan politik yang sah, mau dikritik dan menerima saran-saran positif dari luar. (Kartini Kartono, 2009: 84)

Maka belajar itu mensyaratkan adanya analisa kritis dan rasional, disertai sifat keterbukaan atau futuristik. Karena itu dalam proses belajar ini orang harus terus-menerus bertanya dan bertanya lagi, belajar menjaab dan mempertimbangkan saran-saran eksternal. Kemudian disusul dengan melakukan perbuatan nyata, yaitu melakukan aksi politik. Dengan demikian pendidikan politik dan perbuatan politik itu sangat erat berkaitan, Karena perbuatan/aksi tersebut pada hakekatnya merupakan tujuan dari pendidikan politik.

Dengan mendapatkan pendidikan politik, sebenarnya orang mendambakan kekuatan intelektual dan fisik untuk ikut mengausai kondisi sosial-politik, bahkan juga ikut memberikan tekanan/pressi. Selanjutnya, berdasarkan hak-hak asasi manusia, dalam pendidikan politik itu terdapat dimensi keterbukaan yang prinsipil menuju ke masa-masa yang akan datang yang lebih baik lagi.

Selanjutnya, dalam kegiatan belajar politik dan berpolitik itu mau tidak mau orang akan selalu memilih satu pihak atau satu partai, karena orang tidak puas terhadap macam-macam status quo, kepincangan dan ketidakadilan. Maka dia akan

berpihak pada struktur-struktur yang menyebabkan timbulnya kepincangan dan ketidakadilan, atau memihak kepada kelompok orang-orang yang menuntut dihapusannya kepincangan, ketidakadilan, status quo. (Kartini Kartono, 2009: 85)

2. Kewarganegaraan dan Peranan Politik

Arah pendidikan politik yaitu menuju ke arah transparansi atau keterbukaan dan kebebasan. Orang tidak ingin menunjukkan jalan kepada pribadi lain, akan tetapi membantu orang lain tadi menemukan dan melewati jalannya sendiri dan visi kemasyarakatan yang terbuka. Pandangan hidup terbuka itu menonjolkan kebebasan manusia untuk merealisasikan diri sendiri, dikaitkan dengan relasi personalnya dengan masyarakat sekitar. Karena itu individualisme, demokratisasi, kebebasan personal dan orde sosial yang maju itu saling bertalian tidak bisa dipisah-pisahkan.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, pendidikan politik menyatakan bahwa untuk menentukan apakah masyarakat itu bisa betul-betul maju dan berkembang atau justru tidak bisa berkembang. Masyarakat bisa menjadi wujud bagi diri sendiri yang bebas dan otonom yang mempunyai kemampuan dan wewenang untuk ikut menentukan macam-macam ketetapan sosial, politik dan kultural. Juga berpartisipasi konstruktif dalam pengembangan masyarakat dan lembaga-lembaga politik.

Pendidikan politik di masa sekarang mempunyai tujuan pokok ialah : partisipasi politik rakyat (*politische Beteiligung*), keterpihakan dalam konflik umum terbuka, dan keikutsertaan untuk menentukan kebijakan-kebijakan umum. Maka keberanian menentukan pendirian sendiri secara otonom itu sangat diutamakan dalam pendidikan politik untuk mementukan arah perjuangan politik di tengah banyak konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan-kepentingan. (Kartini Kartono, 2009: 86)

Pendidikan politik menanamkan nilai dan norma yang merupakan landasan dan motivasi bangsa Indonesia serta menjadi dasar nilai untuk membina dan mengembangkan diri guna ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengetahuan tentang kehidupan berpolitik sangat diperlukan bagi seluruh warganegara di masa mendatang untuk dapat menjawab tantangan kehidupan dan konflik-konflik yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat yang semakin kompleks. Melalui pendidikan politik diharapkan bangsa Indonesia secara dini dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman yang bersumber dari berbagai ideologi politik yang tidak sesuai dengan landasan dasar negara kita yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Walaupun sudah tertera jelas dalam tujuan pokok pendidikan politik bahwa adanya partisipasi politik dari rakyat, akan tetapi pada umumnya rakyat hanya seperti dimanfaatkan oleh kaum elite untuk memperjuangkan kepentingan kaum elite dengan mendobrak kebijakan-kebijakan yang sudah ada sehingga sistem pemerintahan akan jatuh dan bisa diambil alih oleh kaum elite /orang orang atas tersebut. Karena orang pada umumnya akan memilih partai bukan berdasarkan rasional, akan tetapi berdasarkan rasa. Jadi walaupun partai memiliki tujuan yang jelas, visi misi yang jelas dan memihak rakyat, akan tetapi semua itu dapat dikalahkan hanya dengan rasa. Seperti hanya jika kita telah menyukai suatu hal, maka tidak akan peduli dengan hal yang lain walaupun mungkin lebih baik.

Maka aktivitas politik itu selalu mengandung intensi untuk mempengaruhi, khususnya mempengaruhi pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak. pendidikan politik itu mengajak para subyek untuk melihat, berfikir, berdialog dan berbuat politik dengan cara lain. jelasnya, pendidikan politik di zaman sekarang itu berusaha menuju ke reorientasi dalam cara merasa, berfikir, berkehendak, yang dikaitkan dengan aksi/perbuatan politik guna mencapai kemajuan dan perbaikan.

Walaupun pada akhirnya kemajuan dan perbaikan itu hanya akan menguntungkan kaum elite saja. Karena partai akan memihak rakyat hanya disaat mereka mereka membutuhkan suara rakyat dalam pemilihan. Setelah itu, hanya sebagian kecil harapan-harapan rakyat untuk perubahan yang terrealisasikan oleh mereka yang terpilih, selanjutnya mereka hanya melakukan kepentingan kaum mereka sendiri. Karena dalam demokrasi tidak semata-mata berkaitan dengan politik, tetapi juga berkaitan dengan kapitalisme. Demokrasi menjadi mekanisme bagi orang-orang yang mempunyai modal (berkuasa). Benar-benar dikatakan demokrasi apabila rakyat memiliki ruang sendiri untuk menyampaikan aspirasi politiknya. Pada kenyataannya, rakyat tidak pernah mendapatkan ruang politik mereka.

Sebenarnya rakyat memerlukan bimbingan agar menjadi majikan yang bebas otonom, dan mampu berkarya dan menjadi produktif, realitas ini supaya dijadikan tema sentral dalam pembangunan. Jangan rakyat dijadikan insan berdimensi satu yang hanya bisa mengkonsumir terus-menerus tanpa boleh memproduksi sendiri.

Pendidikan politik berkewajiban menerangkan bahwa rakyat tidak boleh dijadikan obyek pembangunan atau obyek yang setiap saat bisa dimanipulasikan oleh para pemimpin. Demikian juga tidak boleh dijadikan bahan rekayasa oleh para pemimpin dan pejabat-pejabat yang berkuasa. Rakyat itu adalah subyek bebas yang otonom, bermartabat, punya hak kebebasan dan kemauan bebas, serta ikut memiliki negara, punya potensi untuk menjadi titah Illahi dengan misi hidup yang berharga, yang harus dihormati sebagaimana mestinya oleh sesama manusia

Oleh sebab itu rakyat tidak boleh dimanipulir selaku obyek, atau dijadikan obyek pembangunan atau obyek politik. Obyek pembangunan adalah situasi kondisi dan lokasi pembangunan dengan segala persyaratan teknis dan ekologisnya, yang bisa dimanipulasikan, diubah, diganti dan dikondisikan. Bukan rakyat selaku subyek bebas dan bermartabat insani itu yang direkayasa.

Rakyat bukan milik para pemimpin politik dan para pejabat negara, juga bukan obyek pembangunan yang harus selalu dikalahkan, serta berkewajiban secara total manut tunduk. Memang dalam kondisi tertindas dan tertekan rakyat bisa hidup dan bisa berkembang, akan tetapi perkembangan mereka itu jelas tidak selaras dengan eksistensi dirinya yang autentik. Jelasnya, menurut kodrat dan ketentuan alam sekitar, rakyat harus terus menerus berjuang, membangun, bekerja dan maju berkembang melakukan proses aktualisasi diri. (Kartini Kartono,1996-172)Maka pendidikan politik itu bukan hanya berbicara dan brfikir saja, akan tetapi mengarah ke relasi dengan aksi mengatasi kesulitan dan memecahkan masalah. Oleh karena itu proses belajar politik itu selalu saja berlangsung dalam kaitan dengan berbuat nyata. Tak heran kita, bahwa dalam pendidikan politik itu ada unsur-unsur :

- a. Pembentukan sikap, keyakinan, watak, kepribadian.
- b. Praxis, aksi, perbuatan menuju peningkatan (transendensi) bagi struktur-struktur politik dan kemasyarakatan.
- c. Demokratisasi di segala segi kehidupan.
- d. Kritik kemasyarakatan, dan kritik terhadap kesalahan-kesalahan politik yang dilakukan oleh birokrasi dan partai-partai politik.
- e. Di lanjutkan dengan upaya/praxis mengatasi konflik-konfliknya yang ditimbulkan oleh perbedaan interest dan ideologi. (Kartini Kartono, 2009: 87)

Dengan demikian tujuan khusus pendidikan politik yang khas dan unik adalah :

1. Melatih orang melakukan perbuatan-perbuatan sosial yang baik dan benar, dan pemupukan kabajikan-kebajikan/kebaktian terhadap sesame warganegara.
2. Dalam bentuk solidaritas, cinta bangsa sendiri dan tanah air, bbekerja kooperatif (gotong royong), “fairplay” jujur dan bersungguh-sungguh, dan memupuk toleransi. (Kartini Kartono, 2009: 87)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam pendidikan politik itu ada dua unsur pokok sangat didambakan atau disyaratkan, yaitu :

- Pembentukan hati nurani politik, dan
- Ethik/moralitas pertanggungjawaban politik(Kartini Kartono, 2009: 87)

Supaya orang menggunakan politik sebagai alat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan umat di dunia (dan tidak untuk serakah-serakahnya mengumpulkan kekuasaan, kekayaan dan kemakmuran bagi diri sendiri).

Semangat dari pendidikan politik adalah keikutsertaan (rakyat) dalam peristiwa-peristiwa politik. Oleh karena itu tujuan pendidikan politik harus merupakan tujuan (hidup) rakyat, yaitu tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, supaya bisa “survive”, bisa bertahan hidup. Kalaupun pendidikan politik itu belum mampu melaksanakan aksi-aksi politik tertentu, sekurang-kurangnya lembaga ini bisa mempersiapkan tenaga-tenaga “siap tempur” untuk perjuangan di panggung politik. (Kartini Kartono, 2009: 88)

Aktivitas politik secara konkrit itu pada hakekatnya merupakan mempertanyakan dan menyelesaikan konflik-konflik. Oleh sebab itu konflik-konflik politik actual merupakan isi (tema-tema pokok) dari pendidikan politik. Sedang tema-tema politik merupakan peristiwa konkrit, actual dan kontroversial. Maka untuk memecahkan konflik tersebut diperlukan konstruksi didaktis berupa menemukan metodik khusus untuk dengan akurat dan kritis memevahkan konflik-konflik latent dan actual yang punya relevansi politik.

Publik itu pada umumnya sama sekali tidak punya kekuasaan. Mereka Cuma merasakan dan memikul akibat-akibat dari kekuasaan dan kekuatan eksternal, memikul beban sebagai konsekuensi/buah dari macam-macam kekuasaan. Oleh karena itu, sejarah rakyat itu bukan berupa nasib-peruntungan atau kutukan Tuhan, akan tetapi produk dari tangan dan otak manusia, akibat dari struktur-struktur tertentu yang dibuat oleh sekelompok kecil penguasa, dan diperuntukan bagian besar dari rakyat. Oleh Karen itu sejarah insani itu bisa diganti dan diperbaiki, dan bisa berubah. Dan masyarakat

manusia bisa diubah sedemikian rupa, sehingga setiap individu mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk memberikan bentuk dan isi pada kehidupannya sendiri, sesuai dengan konsep dirinya. (Kartini Kartono, 2009: 89-90)

Tugas pendidikan politik ialah membangun kekuatan-kekuatan kontra melawan situasi politik dan kemasyarakatan yang tidak memuaskan dan penuh disharmoni, menuju ke usaha humanisasi dari kehidupan bersama, dalam mana pribadi manusia itu menjadi focus dari usaha-usaha pembangunan. Dan setiap pribadi didorong untuk berani berfikir jernih, bahkan berfikir lain (tidak konvensional) dan kritis tanpa rasa ketakutan. Khususnya mendorong rakyat menjadi partisipan aktif dalam politik secara bertanggung jawab. Lagi pula, pendidikan politik itu tidak hanya ditujukan pada pengembangan kemampuan-kemampuan sosial dan daya adaptasinya terhadap kehidupan modern yang semakin kompleks rumit saja, akan tetapi terutama diarahkan ke :

- Belajar menggumuli kekuasaan, memahami dan mengontrol jalannya kekuasaan, dan
- Belajar memilih alternatif-alternatif baru yang lebih cocok, diarahkan pada hari esok yang lebih sejahtera. (Kartini Kartono, 2009: 91-92)

Dengan demikian pendidikan politik dapat disamakan dengan upaya mawas secara tajam problematik politik yang actual, diarahkan pada kreativitas individu dan pembaharuan secara kritis terhadap masyarakat bangsa serta kehidupan kenegaraan.

F. Fungsi Belajar Politik Dan Pertanggungjawaban Politik bagi Masyarakat

Sedikit atau banyak pendidikan politik itu merupakan aktivitas agogis yang terlembagakan, yang secara sistematis dan intensional berusaha mendorong peserta (siswa, orang dewasa, rakyat) untuk berpartisipasi politik lebih aktif lagi dalam membangun lembag-lembaga kemasyarakatan dan politik, dan membangun budaya bangsa. Maka pendidikan politik itu megajukan appel terhadap pertanggungjawaban rakyat untuk ikut menata masyarakat lingkungan sendiri dan masyarakat negara. Juga

menuntut dilaksanakannya kewajiban-kewajiban selaku warganegara untuk membangun tanah air, di samping mendapatkan hak-haknya yang wajar-wajar, yaitu untuk membuat “bangunan-bangunan dan bentuk-bentuk” baru di tengah lingkungan budaya bangsa sendiri. Semua aktivitas itu dilakukan secara bertanggung jawab dalam ikatan-ikatan hidup bersama secara gotong royong atau kolektif, atas dasar:

- Kesukarelaan disertai ketulusan-ikhlasan, dan
- Keterlibatan/ketrsangkutannya selaku warga negara di medan politik, yang dianggap sebagai misi (amanat) hidup yang harus dilaksanakan di tengah satu budaya politik tertentu. (Kartini Kartono, 2009: 94)

Dengan demikian pendidikan politik yang berlangsung di tengah budaya politik itu selalu berkaitan dengan : bidang sosial, ekonomi, seni, ilmu pengetahuan, moral nilai-nilai spiritual dan kesusilaan. Maka kultur dan budaya politik itu merupakan manifestasi atau ungkapan dari kegiatan-kegiatan manusia yang terus-menerus berkreasi, sehingga selalu terjadi gerakan-gerakan dan perubahan-perubahan, yang kita kenal sebagai “peristiwa epochal” (peristiwa zaman, kejadian dalam kurun waktu). Artinya, dunia politik itu secara terus menerus mengalami pergeseran dan perubahan dan pada akhirnya memberikan kualitas tertentu pada susunan masyarakatnya, yang dihayati orang secara berbeda-beda pula. (Kartini Kartono, 2009: 94)

Maka pluriformitas (keanekaragaman) bentuk-bentuk kehidupan politik dengan perbedaan norma-norma dan valensi yang dianut manusia itu memberikan alas dasar yang kuat untuk memunculkan satu skala besar keanekaragaman organisasi (struktur dan kelembagaan, asas tujuan dan cara-cara bekerja atau pencapaiannya). Sebagai konsekuensinya juga akan dimunculkan bermacam-macam bentuk kerjasama dan beranekaragam konflik politik dunia.

Tema bahasan dalam pendidikan politik ialah bentuk-bentuk pergaulan hidup yang dinamis dan selalu mengalami perubahan dari macam-macam kelompok sosial (grup, kolektivitas, ras, suku, bangsa, dan lain-lain), yang dibahas lewat dialog-dialog terbuka

dan penuturan, berupa analisis kritis dan ulasan. Pendidikan politik itu mempunyai orientasi sosial di samping orientasi individual (untuk meningkatkan martabat dan keterampilan teknis politik individu), dan kegiatan praktis/praxisnya. Karena pembahasan yang dibahas oleh aktor-aktor politik adalah bentuk-bentuk pergaulan hidup atau struktur-struktur kemasyarakatan. (Kartini Kartono, 2009: 95)

Di zaman modern sekarang ini orang tidak hanya mementingkan pendidikan dan pembentukan intelektual saja (pengembangan unsur-unsur kognitif), akan tetapi lebih banyak ditujukan pada pengangkatan harkat dan martabat totalitas manusia, di samping pengembangan daya-daya estetis dan moral (akhlak, budi, kesusilaan)

Karena pendidikan sekarang telah menjadi prestise sendiri di mata masyarakat. Melalui pendidikan orang akan mendapatkan padangan sendiri di mata masyarakat. Orang yang berpendidikan tinggi pasti akan lebih disegani daripada orang yang berpendidikan rendah. Pendidikan memiliki stratifikasi sendiri dalam lingkungan masyarakat. Orang yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah untuk mendapatkan jabatan di suatu lembaga atau instansi daripada orang yang kurang berpendidikan.

Sebab manusia-manusia modern mengejar ideal-ideal normatif tertentu, yang hidup di tengah-tengah kelompok-kelompok sosiologi, dan secara terus menerus terlibat dalam satu proses historis yang dinamis. Pada intinya, manusia atau individu tidak mau ditinggalkan oleh kaumnya, atau tidak ingin ketinggalan zaman, meskipun karena situasi dan kondisi tertentu ada banyak individu, kelompok, suku, bangsa yang masih tertinggal dari kondisi zaman. Oleh karena itu perlu adanya gerak emansipasi dari kelompok yang tertinggal itu untuk dientaskan dan mengentaskan diri dari kondisi keterjepitannya. Dalam gerak emansipasi ini jelas terdapat hasrat untuk menentukan nasib sendiri status sosial, harkat dan martabat diri serta usaha untuk mewujudkan manusia (Indonesia) baru yang progresif dan berkesejahteraan. Pendidikan politik berfungsi sebagai penggerak kesadaran masyarakat terhadap gerak emansipasi ini.

Menyadarkan masyarakat bahwa semua orang di mata negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa melihat latar belakang mereka.

Oleh sebab itu dalam pendidikan politik dimensi pertanggungjawaban etnis-politik merupakan fundamen dasar bagi usaha pembentukan kepribadian manusia. Sebabnya pendidikan politik itu ditanamkan dua hal pokok, yaitu :

1. Pembantuan hati nurani politik, dan
2. Pertanggungjawaban etnis-politik berasaskan keadilan, kebaikan dan kebenaran.

Kedua hal tersebut di atas secara implisit mewajibkan setiap insan politik untuk berkelakuan baik. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan manipulatif dan eksploitatif, tidak mengutamakan kepentingan pribadi, tidak mehalalkan hal-hal licik dan jahat, juga supaya tidak menjadi *political animal*. Semua perbuatan politik harus berdasarkan suara hati nurani sendiri yang murni, dan sesuai dengan tuntutan hati nurani segenap rakyat. Sebab perbuatan politik tersebut mengenai nasib dan mati-hidupnya rakyat banyak. Maka setiap warganegara harus banyak melakukan kebajikan, dan bertanggung jawab penuh atas segala perbuatan politiknya. (Kartini Kartono, 2009: 97)

Dalam nafas tafsiran Giesecke, pendidikan politik dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pertama, Bildungswissen artinya : mengetahui dan memahami gambaran manusia/*mensbeeld* dan perkembangannya, serta gambaran kebudayaan bangsa sendiri, berdasarkan satu *Menschanschauung* (*visi kemanusiaan tertentu*). Bagi Indonesia, *Menschanschauung* ini adalah Pancasila, yang digunakan landasan filsafat dari pendidikan politik, kemudian dijadikan acuan-ancang bagi penyusunan teori mengenai pendidikan politik. *Menschanschauung* tersebut bila ditambah dengan visi-kemasyarakatan, akan menentukan arah yang harus dituju oleh pendidikan politik, di samping melandasi penyusunan teori yang sistematis, serta ditimbang secara bijaksana dan kritis. Tegasnya, *Menschanschauung* yang menjadikan person manusia sebagai focus pembahasan itu sifatnya “memberikan pengarahan” yang jelas. Dan secara

dinamis diarahkan pada masa depan yang lebih baik. Sehubungan dengan hal tersebut, manusia dengan kesejahteraannya itu merupakan “unsur keterbukaan prinsipil” mengarah ke masa depan. Oleh karena itu ciri khas dari manusia dan pendidikan politiknya adalah membangun diri, atau membuat proyek dari kehidupan sendiri. (Kartini Kartono, 2009: 97-98)

Kedua, Orientierungswissen, artinya berorientasi pada *paham kemanusiaan* yang bisa memberikan kebaikan, kebahagiaan, kemakmuran, keadilan kesejahteraan kepada setiap warganegara dan umat manusia. Pendidikan politik harus melakukan pendekatan pada totalitas person, pada unsur afeksi emosi dan sentimennya, pada ambisi, harapan dan aspirasinya, pada cita-cita dan kebutuhannya. Ringkasnya pada visi total/global dari prson manusianya, dalam mana sosialitas, ndividua;itas dan moralitas tergarap di dalamnya. Dalam proses pendidikan politik itu secara obyektif orang harus berani melihat realitas politik, dan mau mengadakan orientasi-ulang terhadap situasi kondisi politik ynag pincang penuh kesenjangan sosial. Khususnyaberani mengoreksi kesalahan, kelemahan, noda dan unsur-unsur destruktif (merusak) lain yang ada di masyarakat. Sehingga dibsa ditemukan alternative pemcahan masalah yang lebih baik dan lebih adil. (Kartini Kartono, 2009: 98-99)

Ketiga, Verhaltungsweisen, yaitu menunjuk atau megarahkan pada tingkah laku pemahaman hukum, norma, tata tertib dan semua peraturan yang sah untuk menuntun tingkah laku politik. Tujuannya ialah agar subyek (pelaku politik) menjadi lebih cermat dan lebih arif bijaksana menanggapi situasi kondisi politik yang ada. Caranya ialah dengan jalan :

- Mengendalikan tingkah laku sendiri atas pertimbangan hati nurani yang murni
- Sehingga orang tidak menjadi salah tindak, tidak egoistis-egosentris, dan tidak menjadi “political animal”
- Menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan ksusilaan.

Maka nalar-budi, etis-susila, dan pakerti itu harus runtun saling berkaitan dalam konsepsi manusia dan konsepsi-konsepsi politik. Hal ini adalah wajar, dan diperlukan untuk mencipta institusi politik dan kemasyarakatan yang damai dan adil. pendidikan politik itu janganlah dipakai sebagai alat defensf atau senjata justifikasi (pembenaran) status quo dan “kemampuan semu” yang pada hakekatnya merupakan kepincangan dan kondisi ketidakadilan dengan memanfaatkan sarana-sarana agogis pedagogis. (Kartini Kartono, 2009: 100)

Keempat, Aktionissen, yaitu mau berbuat atau beraksi, mampu bertingkah laku/berbuat politik secara cermat, tepat dan benar, didukung oleh prinsip kebenaran dan keadilan, didahului oleh refleksi obyektif dan wawasan kritis. Prinsip kebenaran dan keadilan tersebut berdifat universal. Sedang refleksi mengandung kesanggupan mempertimbangkan baik-baik, dan mampu melakukan pencerminan kembali peristiwa-peristiwa politik. Terjadi kemudian wawasan reflektif yang membuahkan ide-ide dan aksi/tindakan yang tepat dan mantap untuk mengatasi macam-macam konflik dan menyelesaikan berbagai masalah politik yang akut. Lewat kegiatan reflektif dan wawasan kritis, yang ditunjang oleh pertimbangan dorongan hati nurani dan pertanggungjawaban ethis-politis terhadap sesama manusia, akan tumbuh keberanian bertindak dan ketepatan mereaksi serta beraksi. (Kartini Kartono, 2009: 104)

Oleh karena itu pendidikan politik pada hakekatnya merupakan :

1. Usaha belajar yang terus menerus dan berkesinambungan
2. Peningkatan diri (eskalasi diri) dalam konstelasi politik
3. Usaha meningkatkan masyarakat dan negara. (Kartini Kartono, 2009: 104)

Belajar dalam pendidikan politik dapat diartikan sebagai:

- Kegiatan meragukan dan mempertanyakan posisi diri sendiri selaku warganegara dengan kewajiban dan hak-haknya
- Mempertanyakan situasi dan kondisi lingkungannya, khususnya yang mengait diri sendiri dan masyarakat sekitar

- Dan memberikan pertanggungjawaban sosial terhadap sesama hidup. (Kartini Kartono, 2009: 104-105)

Oleh karena itu belajar politik selalu dimulai dengan :

1. Meragukan dan mempertanyakan status politik diri sendiri dalam konstelasi politik tertentu sambil,
2. Mengajukan pertanyaan mengenai hak-hak, tanggung jawab terhadap sesama, dan kewajibannya selaku warganegara,
3. Mengadakan analisa kritis terhadap peranan pemerintah dan keadaan negara, untuk memikirkan alternatif-alternatif pemecahan masalah-masalah. Jadi, ada wawasan akurat mengenai lembaga-lembaga kemasyarakatan dan politiknya. (Kartini Kartono, 2009: 105)

Politik menurut versi kuno yang sempit dan statis ditafsirkan sebagai : pengaturan negara, penggunaan kekuasaan, justifikasi tingkah laku para pemimin, rasionalisasi opini dan perbuatan para penguasa walaupun tidak rasional sifatnya, konservasi, upaya mempertahankan status quo lama dengan segala fasilitas dan keenakan bagi kelompok elite. Dalam kaitannya penafsiran politik seperti yang disebutkan, politik dan demokrasi itu adalah “barang jadi yang sudah mantap”, yang tidak boleh dikutik-kutik dan tidak bisa diganggu gugat, sebab semuanya sudah jadi dan sudah mantap.

Sebaliknya, arti politik menurut versi modern dan dinamis menitikberatkan masalah-masalah kesinambungan atau kontinuitas, goncangan, perubahan, proses membelum atau proses menjadi, yang semuanya diarahkan ke arah peningkatan dan perbaikan.

Maka tema politik adalah kejadian-kejadian konkrit yang aktual, yang sedang marak dan dibutuhkan oleh banyak orang, yang tajam, keras dan sering kejam, serta mengandung unsur-unsur kontroversial karena kejadiannya hampir selalu dijadikan bahan rebutan dan obyek manipulasi oleh perorangan dan oleh kelompok-kelompok

yang tengah berkuasa. Alasannya ialah demi pencapaian interest pribadi dan interest kelompok sendiri, demi kepentingan egoistis dan sektaristis. Dan akibatnya muncul banyak kontroversi dan konflik keras. (Kartini Kartono, 2009: 109)

Selanjutnya, *political insight* (wawasan politik) benar-benar diperlukan karena orang merasa kurang/tidak puas terhadap kepincangan-kepincangan sosial yang banyak terdapat di tengah masyarakat, dan dirasakan sebagai hal yang tidak mapan dan tidak adil. Wawasan politik yang tajam dan tepat pada umumnya diperoleh lewat pelatihan dan pendidikan politik secara sistematis, sehingga daya analisa subyek menjadi tajam. Kemudian dia berani memberikan kritik-kritik obyektif dan konstruktif atas dasar data factual. Dalam kegiatan politik sedemikian ini jelas terdapat gerak *emansipatoris*, yaitu gerakan untuk melepaskan diri dari belenggu kebekuan dan ketakutan. Juga membebaskan diri dari bermacam-macam belenggu yang dibuat oleh manusia bagi manusia lainnya (misalnya belenggu penindasan, penekanan, paksaan, ketidakadilan, ketertinggalan, kemiskinan, kesengsaraan, dan lain-lain). (Kartini Kartono, 2009: 109-110)

Melalui perjuangan politik orang tidak mau berhenti pada kemantapan-kemantapan historis yang diduga tidak bisa berubah dan tidak mungkin diubah. Akan tetapi selalu saja orang melakukan pemikiran ulang, usaha reorganisasi, redifinisi, revisi dan rekonstruksi terhadap kondisi-kondisi sosial politik dan knegaraan, ditujukan pada peningkatan dan perbaikan. Massa yang belajar politik dan aktif ingin mengetahui segala perilaku politik yang dilakukan oleh para pemimpin yang memerintah atas nama rakyat. Mereka akan menuntut transparansi politik. Sebab pada hakekatnya rakyat yang ikut memiliki negara ini berhak turut menentukan kebijakan-kebijakan public yang akan dijalankan oleh pemerintah. Oleh karena itu salah satu ciri negara modern ialah adanya interaksi politik yang menjadi semakin bulat, antara bermacam-macam suku dan golongan, juga antara aspirasi pemerintah/para pemimpin negara dengan aspirasi rakyat di tambah dengan semakin tinggi partisipasi rakyat di dalam proses politik. (Kartini Kartono, 2009: 110-111)

Maka negara modern, rakyatnya tidak merupakan massa mengambang yang pasif dan bersikap masa bodoh terhadap kejadian-kejadian politik. Serta tidak bersikap sinis terhadap kelemahan dan kesalahan politik yang dilakukan pemerintah baik secara sadar maupun tidak sadar.

Subyek belajar dalam kegiatan pendidikan politik ialah individu-individu yang tengahbelajar atau siswa belajar. Sekolah, panti dan lembaga-lembaga tertentu merupakan lokasi proses belajar. Sedangkan “guru” adalah organisatoris dari semua proses belajar politik. Guru tidak menjadi sumber pengetahuan satu-satunya, sebab semua individu yangtenagh belajar politik itu juga ikut memberikan saham dalam pemberian informasi, selaku organisatoor, guru bertugas untuk :

1. Memberikan jalan dan fasilitas kemudahan, agar para siswa bisa mendapatkan informasi yang akurat
2. Melatih siswa berfikir kritis dan mandiri (menjadi pribadi otonom)
3. Mendorong siswa bertingkah laku/berbuat politik lurus dan benar, sesuai dengan naluri kemanusiaannya serta hati nuraninya yang bening. (Kartini Kartono, 2009: 112)

Guru selaku organisator pada hakekatnya juga merupakan pengiring dan pengantar proses bagi perkembangan pribadi siswa. Dalam hal ini keberadaannya menjadi sarana belajar (*leermiddle*) yang menduduki satu tempat metodik.

Subyek di dalam pendidikan politik itu adalah rakyat atau warganegara.secara agogis, rakyat tidak boleh diremehkan atau dipandang rendah, juga tidak boleh dijadikan obyek pendidikan (tidak boleh diobyektivir). Akan tetapi juga tidak boleh dinilai berlebih-lebihan (*overestimate*). Jelasnya, rakyat yang dianggap “bodoh dan promitif” itu betapapun terbelakang kondidinya, mereka adlah warganegara yang terhormat dan bermartabat, yang patut dihargai keberadaannya. Mereka merupakan sumber daya insani potensial yang perlu dikembangkan dan diakutualkan, juga perlu

mendapatkan pendidikan politik yang wajar, supaya mampu berpartisipasi politik. (Kartini Kartono, 2009: 113-114)

Akan tetapi rakyat yang dianggap “bodoh dan primitif” inilah yang menjadi sasaran empuk bagi kaum elite untuk dimanfaatkan. Karena sedikit saja bujukan atau rayuan maka mereka akan terlena dengan “iming-iming” yang telah diberikan. mereka tidak dapat bersifat kritis terhadap keadaan akibat dari kondisi latar belakang yang timpang dengan masyarakat lainya. Sehingga sangat minim pendidikan politik yang mereka dapatkan. Mereka tetap akan ikut berpartisipasi dalam aktivitas politik, akan tetapi aktivitas mereka belum jelas apakah dari hati nurani masing-masing atau hanya berupa dorongan dari kaum elite yang memanfaatkan mereka. pendidikan politik seharusnya merata di setiap kalangan masyarakat, sehingga setiap masyarakat dapat berfikir kritis terhadap keadaan dan dapat turut serta dalam memecahkan konflik-konflik yang ada.

Dalam suatu demokrasi, di Indonesia ialah demokrasi Pancasila, diman warganegara yang aktif itu mengetahui dan memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan juga kut mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan pemerintah. Bahkan warganegara berperan serta secara aktif dalam imbalan-imbalan kekuatan dan kekuasaan tadi. Setiap warganegara harus ikut menentukan dan berperan serta dalam mengubah kondisi masyarakat yang buruk keadaannya lewat jalan politik yang sah dan berbuat nyata.

Jiwa dari pendidika politik itu adalah “*politische Engagement*” (ikatan-perjanjian politik), yaitu keikutsertaannya dalam peristiwa-peristiwa politik, dan peranan turut menentukan kebijakan-kebijakan politik. Hal ini mengingatkan, bahwa tujuan pendidikan politik itu pada hakekatnya merupakan tujuan rakyat/warganegara. Kalau tidak demikian, maka pendidikan politik tersebut vukup berupa perilaku menipuasi terhadap rakyat.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pendidikan politik adalah upaya menyadarkan masyarakat dari belenggu yang dibuat oleh manusia bagi manusia lainnya. Dengan adanya pendidikan di harapkan seluruh warganegara dapat sadar dan dapat meningkatkan pengetahuannya dalam berpolitik, mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan, memaksimalkan hak mereka, melaksanakan kewajiban mereka, dan juga turut berpartisipasi dalam segala bentuk aktivitas politik.

B. Saran

Seharusnya pendidikan politik di Indonesia dilaksanakan secara merata tanpa harus memandang latar belakang masyarakat. Pendidikan politik adalah tugas negara, sebaiknya tidak disalahgunakan untuk mendoktrin rakyat, tetapi digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan rakyat terhadap politik sehingga dapat turut serta berpartisipasi dalam politik guna mewujudkan Indonesia yang lebih baik kedepannya

DAFTAR PUSTAKA

Kartono, Kartini. 1996. *Pendidikan Politik*. Bandung: Mandar Maju

Kartono, Kartini. 2009. *Pendidikan Politik : Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa*.
Bandung: Mandar Maju

Siswoyo, Dwi, dkk. 2013. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press

Sugiarto, dkk. 2013. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press

journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/6026/5218 diakses pada 9 Juni 2017 pukul
09.34 WIB

ejurnal.unisri.ac.id/index.php/widyawacana/article/viewFile/420/377 diakses pada 8 juni
2017 pukul 09.22 WIB

digilib.uinsby.ac.is/6039/5/Bab%202.pdf di akses pada 14 Juni 2017 pukul 16.43 WIB

journal.uny.ac.id/index.php/cp/articleviewFile/383/pdf diakses pada 14 Juni 2017 pukul
21.38 WIB